

Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa

Ridho Mulyo Pambago¹, Saparuddin Mukhtar², Aditya Pratama³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

E-mail: ridhopamba@gmail.com¹, saparuddin@unj.ac.id², adityapratama@unj.ac.id³

Article History:

Received: 11 Januari 2024

Revised: 21 Januari 2024

Accepted: 24 Januari 2024

Keywords: *Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terkait dengan pengaruh upah minimum, inflasi, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil regresi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa; inflasi berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa; dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tercatat hingga tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275 juta jiwa. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar membuat potensi tenaga kerja juga sangat besar. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya diikuti juga dengan pertumbuhan angkatan kerja. Dengan kata lain pasokan tenaga kerja di pasar tenaga kerja ikut mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan persediaan tenaga kerja yang diakibatkan dari adanya pertumbuhan angkatan kerja tidak selalu diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja baru. Terjadinya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan terciptanya kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan, yaitu angka pengangguran.

Tabel 1. Data keadaan penduduk dan ketenagakerjaan di Indonesia

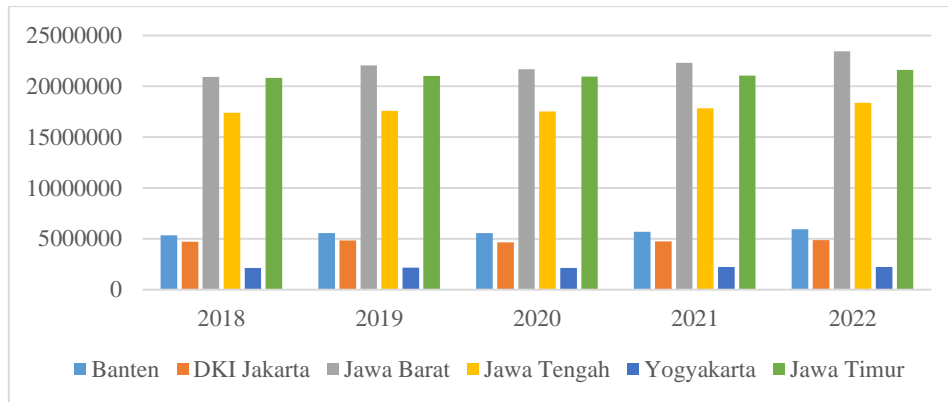
Tahun	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja	Bekerja	TPT
2018	264.161.600	131.005.641	124.004.950	5,3%
2019	266.911.900	133.560.880	126.515.119	5,23%
2020	270.203.900	138.221.938	128.454.184	7,07%
2021	272.682.500	140.152.575	131.050.523	6,49%
2022	275.773.800	143.722.644	135.296.713	5,86%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan karena angka kelahiran yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia terbilang masih cukup rendah, di mana angka tersebut tidak dapat menjangkau jumlah angkatan kerja. Minimnya jumlah kesempatan kerja yang tersedia menjadi alasan bahwa tidak semua angkatan kerja dapat terserap. Penawaran tenaga kerja yang jumlahnya lebih besar dibandingkan permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jumlah penduduk Indonesia yang besar yang mana diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi seharusnya dapat menjadi pendorong bagi perekonomian, namun pada kenyataannya ini menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam makroekonomi yang dapat menggambarkan keadaan perekonomian pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut baik secara regional dan nasional menjadi semakin cepat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi salah satunya ialah mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan (Basnett & Sen, 2013). Besarnya PDB suatu negara ditentukan dengan seberapa banyak lapangan usaha yang ada dapat menyerap tenaga kerja. Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari table 1 pada bagian “jumlah penduduk bekerja”.

Terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa mengakibatkan beberapa provinsi di Pulau Jawa menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk di Indonesia. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa sebenarnya dapat menjadi potensi tenaga kerja yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya jumlah penduduk tersebut dapat menimbulkan permasalahan juga di mana tingginya jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, menurut BPS pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,31% dan berkontribusi hingga 56,48% ke pertumbuhan ekonomi nasional (Kristianus, 2023). Artinya ekonomi di Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa. Hal ini yang membuat Pulau Jawa menjadi destinasi utama para tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah untuk dapat bekerja di pulau ini.

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja yang tersebar di seluruh sektor perekonomian. Gambar I menunjukkan data jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Jawa di masing-masing provinsi tahun 2018-2022. Dapat dilihat dari gambar tersebut setiap tahunnya jumlah penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang membuat banyak perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaganya, bahkan tidak sedikit perusahaan yang memilih untuk gulung tikar. Berdasarkan data tersebut provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang bekerja terbesar di mana terdapat 23.452.568 jiwa penduduk yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang bekerja terendah di mana terdapat 2.241.131 jiwa penduduk yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Jawa sebesar 77.513.173 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sebesar 81.974.223 jiwa atau sebanyak 94% rasio orang yang bekerja dibandingkan angkatan kerja.



Gambar 1. Data jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Jawa tahun 2018-2022

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, dan pengeluaran non upah. Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pengangguran, tingkat bunga dan pengeluaran pemerintah (Jagaditha & Yasa, 2019). Pada penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu upah minimum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang. Besar atau kecilnya tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi pada permintaan tenaga kerja. Upah memiliki peranan yang penting dalam ketenagakerjaan. Upah dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, semakin tinggi tingkat upah maka permintaan tenaga kerja menjadi semakin sedikit, karena beban yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin bertambah dengan asumsi input lain tetap.



Gambar 2. Upah Minimum Provinsi dan Nasional

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa tidak merata nilainya. Upah minimum provinsi di Pulau Jawa bisa dikatakan mengalami ketimpangan dan nilainya masih cukup rendah dibandingkan provinsi-provinsi di pulau lain, kecuali DKI Jakarta. Upah Minimum di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 Rp4.573.845 yang

mana menjadi paling tertinggi se-Indonesia. Sedangkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah yakni nilainya mencapai Rp1.812.935. Bahkan, keempat provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menjadi empat provinsi dengan nilai upah minimum provinsi terendah di Indonesia. Nilai upah keempat provinsi tersebut dibawah rata-rata upah nasional yaitu sebesar Rp2,72 juta.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah inflasi. Inflasi merupakan naiknya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Menurut Nanga (2005) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu wilayah memiliki beberapa dampak dan akibat. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan barang dan jasa yang dihasilkan dan tenaga kerja. Inflasi yang terjadi dapat memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang sudah dilakukan tergantung pada tingkat intensitas inflasinya.

Selanjutnya apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan (<10 persen), perusahaan akan berusaha menambah jumlah output produksinya karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk meningkatkan outputnya tentu diikuti dengan permintaan tenaga kerja yang meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika dalam suatu perekonomian mengalami inflasi yang tergolong berat bahkan mengalami *hyperinflation*, maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang yang menjadi kenyataan dialami oleh suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan acuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Setiap tahunnya PDRB atas dasar harga konstan di Pulau Jawa mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dikarenakan adanya covid-19. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah, maka akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat menekan angka pengangguran (Yanda et al., 2022). Melihat pesatnya perkembangan di Pulau Jawa yang didukung melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang terjaga, serta dukungan dari upah minimum. Namun dukungan tersebut dirasa belum mampu memaksimalkan penyerapan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya kondisi demikian membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan studi analisis lebih lanjut mengenai “Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, dan untuk mengetahui pengaruh produk domestic regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

LANDASAN TEORI

Teori Klasik

Menurut Teori Klasik Adam Smith, manusia merupakan faktor produksi utama yang dapat menentukan kemakmuran suatu negara. Smith juga menyampaikan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, maka yang selanjutnya dibutuhkan ialah akumulasi modal (fisik) agar ekonomi dapat tumbuh. Hal

ini berarti, sayarat perlu (*necessary condition*) yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ialah alokasi sumber daya manusia yang efektif. Sumber utama pendapatan ialah produksi dari hasil tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. Pandangan kaum klasik mengenai kesempatan kerja, yaitu tingkat *output* dan harga keseimbangan hanya dapat dicapai apabila perekonomian berada pada keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk yang sudah berusia 15 tahun keatas yang memiliki potensi dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Simanjuntak (1985) tenaga kerja atau manpower adalah penduduk yang sedang atau sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja (*manpower*) merupakan faktor terpenting dalam suatu proses produksi karena manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, modal, dan sebagainya.

Jumlah penduduk yang bekerja dapat terserap karena adanya permintaan tenaga kerja oleh para produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja (Tulumang et al., 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh kegiatan unit usaha. Terserapnya penduduk yang bekerja dapat disebabkan oleh adanya keseimbangan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana dalam pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran tenaga kerja bersama-sama dalam menentukan tingkat keseimbangan upah dan penggunaan tenaga kerja.

Menurut Bellante & Jackson (1985) Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah (yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan (dalam hal ini dapat dikatakan atau dibeli. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: produktivitas tenaga kerja, perubahan teknologi, jumlah perusahaan, keuntungan perusahaan, kualitas tenaga kerja, dan tingkat upah.

Upah Minimum

Faktor-faktor produksi sangat diperlukan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa tanah, modal, sumber daya manusia dan kewirausahaan. Salah satunya ialah upah yang merupakan balas jasa dari penggunaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai faktor produksi juga memiliki pasar, yaitu pasar tenaga kerja. Tinggi atau rendahnya permintaan pasar dan penawaran tenaga kerja tergantung pada harga tenaga kerja atau yang biasa dikenal sebagai upah (*wage*).

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Tinggi atau rendahnya upah akan mempengaruhi biaya produksi, sehingga dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang akan dipergunakan dalam proses produksi. Upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja terbagi atas: upah nominal, upah riil, upah hidup, upah minimum, dan upah wajar.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 tahun 2013 menyatakan

upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Pemerintah memberlakukan upah minimum agar dapat menjangkau sebagian kecil pekerja atau buruh. Penentuan kebijakan upah minimum didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu : biaya kebutuhan hidup minimum, tingkat inflasi, upah minimum antar daerah, kondisi pasar tenaga kerja, dan pendapatan perkapita (Azzahra & Prakoso, 2021).

Inflasi

Inflasi menjadi salah satu permasalahan penting dalam perekonomian bagi seluruh negara-negara. Tujuan pemerintah dalam jangka panjang ialah menjaga agar nilai inflasi yang berlaku pada tingkat yang rendah. Tingkat inflasi sebesar nol persen bukan menjadi tujuan utama dari pemerintah karena hal itu sulit dicapai. Namun, yang paling penting adalah bagaimana agar menjaga nilai inflasi tetap rendah. Inflasi mengakibatkan nilai riil uang dalam masyarakat menurun dan menyebabkan daya beli masyarakat ikut juga menurun.

Menurut Prathama & Mandala (2019) inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Menurut Hasyim (2016) inflasi didefinisikan sebagai gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Apabila kenaikan harga yang berlangsung sekali atau dua kali saja, kemudian kembali ke harga normal, itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Selain itu, apabila yang mengalami kenaikan hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Syarat terjadinya inflasi ada tiga, yaitu kenaikan harga, secara umum, dan terus-menerus.

Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu inflasi tekanan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Inflasi tekanan permintaan (*demand pull inflation*) adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Tekanan permintaan menyebabkan *output* perekonomian bertambah, tetapi disertai inflasi, dilihat dari makin tingginya tingkat harga umum. Sedangkan inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*) adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Pada umumnya setiap perkembangan ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan harga naik secara otonom menyebabkan penawaran agregat bergeser ke kiri atas. Naiknya biaya produksi disebabkan naiknya harga *input* pokok. Misalnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP), kegagalan panen, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

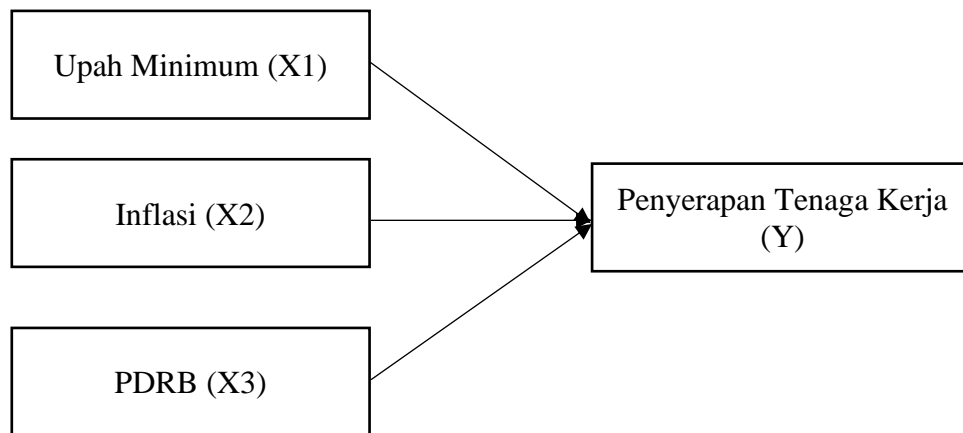
Inflasi dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IPHB), dan indeks harga implisit (PDB deflator). Indeks harga konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks harga perdagangan besar (IPHB) adalah indeks yang menunjukkan gambaran perkembangan harga pada tingkatan perdagangan besar (grosir) dari komoditas-komoditas yang diperjualbelikan dalam suatu negara atau daerah. Indeks harga implisit (IHI) adalah indeks yang menggambarkan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam jumlah yang besar dan mencakup wilayah yang lebih luas.

Produk Domestik Regional Bruto

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Tujuan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, metode yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil).

Produk Domestik Bruto dapat digunakan untuk melihat keadaan perekonomian secara nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah atau daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh sebab itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah bergantung terhadap potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Dengan meningkatnya perekonomian, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga kesejahteraan masyarakat.

Produk domestic regional bruto dapat dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Hartono et al., 2018).



Gambar I Model Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini ialah :

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Upah Minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
2. Diduga Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

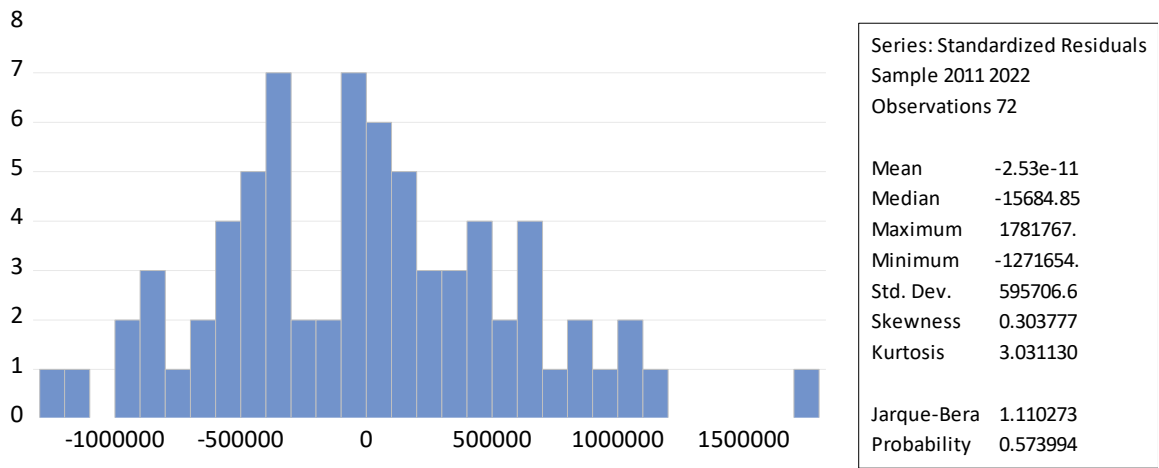
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah penyerapan tenaga kerja, sedangkan variable independennya adalah upah minimum, inflasi, dan produk domestic regional bruto (PDRB). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, di mana data time series yang berupa data runtut waktu dalam periode 2011-

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi data yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Model regresi data normal memiliki nilai probabilitas Jarque-Bera $> 0,05$ dan sebaliknya apabila nilai probabilitas Jarque-Bera $< 0,05$ maka distribusi data dikatakan tidak normal.



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar IV hasil uji normalitas diatas dapat dilihat hasil Jarque-Bera sebesar 1.110273 dan nilai probabilitas sebesar 0.573994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dikatakan terdistribusi normal karena hasil Jarque-Bera < 2 ($1.110273 < 2$) dan nilai probabilitas $> 0,05$ ($0.573994 > 0.05$)

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi dimana satu atau lebih variable bebas dapat dinyatakan sebagai gabungan dari variable lain. Sederhananya multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independent dalam suatu regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antara variable independent.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	UMP	INFLASI	PDRB
UMP	1.000000	-0.261822	0.466379
INFLASI	-0.261822	1.000000	-0.115667
PDRB	0.466379	-0.115667	1.000000

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi variable independen tidak lebih dari 0,8 maka dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data

memiliki kandungan heteroskedastisitas atau tidak. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus dipenuhi yaitu nilai probabilitas > 0,05 maka data terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	547267.0	269760.9	2.028711	0.0467
UMP	-0.048199	0.132754	-0.363074	0.7178
INFLASI	-2870.436	17805.73	-0.161209	0.8724
PDRB	1.87E-05	0.000442	0.042410	0.9663

Berdasarkan hasil uji diatas pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas masing-masing variable bebas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data pengujian terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Dalam mengetahui pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa yang menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel. Setelah dilakukan uji chow dan uji hausman, maka model yang terpilih dan digunakan dalam penelitian adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7046181.	571176.2	12.33627	0.0000
UMP	-0.767668	0.281085	-2.731084	0.0082
INFLASI	7896.332	37700.83	0.209447	0.8348
PDRB	0.006118	0.000936	6.537144	0.0000

Berdasarkan hasil uji pada Table 1.6 maka diperoleh hasil regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + B_3X_{3it} + e$$

$$Y = 7046181. - 0.767688X_1 + 7896.332X_2 + 0.006118X_3 + e$$

Uji T

Tabel 6. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7046181.	571176.2	12.33627	0.0000
UMP	-0.767668	0.281085	-2.731084	0.0082
INFLASI	7896.332	37700.83	0.209447	0.8348
PDRB	0.006118	0.000936	6.537144	0.0000

Uji statistic t pada dasarnya dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variable bebas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat. Berdasarkan hasil uji diatas pada Tabel 1.7 dapat dilihat dari nilai probabilitasnya, apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variable independent berpengaruh dan signifikan terhadap variable dependen. Dapat dilihat bahwa variable Upah dan PDRB nilai probabilitasnya < 0.05 (0.0073 dan 0.0000) sehingga dapat dikatakan upah minimum dan pdrb berpengaruh signifikan. Sedangkan variable inflasi memiliki nilai probabilitas 0.9092 ($0.9092 > 0.05$) dan dapat dikatakan inflasi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Root MSE	591555.3	R-squared	0.994193
Mean dependent var	11532740	Adjusted R-squared	0.993455
S.D. dependent var	7816969.	S.E. of regression	632399.2
Akaike info criterion	29.66890	Sum squared resid	2.52E+13
Schwarz criterion	29.95348	Log likelihood	-1059.080
Hannan-Quinn criter.	29.78219	F-statistic	1348.134
Durbin-Watson stat	0.364851	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji statistic F pada dasarnya dilakukan untuk melihat apakah semua variable independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Berdasarkan hasil uji diatas pada Tabel 1.8 dapat dilihat bahwa probabilitas F statistic sebesar 0.000000 ($0.00 < 0.05$) serta nilai F statistic $> F$ table ($1348.134 > 2.742$). Sehingga dapat disimpulkan secara simultan variable independent yaitu upah minimum, inflasi, dan produk domestic bruto berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen yaitu penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2011-2022.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Artinya ketika angka semakin mendekati 1 maka kemampuan variable independent dalam menjelaskan variable dependen semakin tepat. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1.8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.993455 atau 99,34 persen artinya variasi variable penyerapan tenaga kerja (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variable independent yaitu upah minimum, inflasi, dan produk domestic regional bruto. Sedangkan sisanya sebesar 0,66 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dengan probabilitas sebesar 0.0082 dan koefisien regresinya -0.799684. Artinya apabila terjadi peningkatan upah minimum maka akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hasil koefisien regresi menunjukkan -0,767668 yang dapat diinterpretasikan apabila upah minimum provinsi naik sebesar 1 persen dengan asumsi

ceteris paribus, maka penyerapan tenaga kerja akan turun sebesar 0,76 persen.

Menurut teori permintaan tenaga kerja ketika upah meningkat maka ini cenderung membuat pengusaha untuk mengurangi tenaga kerja. Kenaikan upah akan mempengaruhi biaya produksi, ketika biaya produksi meningkat maka harga juga akan meningkat. Sesuai dengan teori permintaan bahwa ketika harga meningkat maka membuat permintaan barang dan jasa akan menurun. Apabila banyak barang yang tidak terjual maka membuat pengusaha akan mengurangi jumlah produksinya. Turunnya jumlah produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi (Soelistyo, 2018). Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja jika upah naik maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan menurun dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wasilaputri (2016) yang mengatakan upah berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relative lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja dengan input lain yang harganya lebih murah untuk mempertahankan keuntungan. Sejalan dengan Mankiw (2003) efek yang paling terasa dengan adanya penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang makin tinggi dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya (penurunan permintaan tenaga kerja) disisi lain pencari kerja akan menjadi lebih bersemangat mencari pekerjaan karena tingkat upah yang diberikan lebih tinggi sehingga terjadinya *excess supply labor*. Efek lainnya adalah jumlah pengangguran meningkat karena perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakannya (Buchari, 2016).

Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dengan probabilitas sebesar 0.8348 dan koefisien regresinya 7896.332. Artinya apabila terjadi peningkatan atau penurunan inflasi maka tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Inflasi adalah salah satu indicator yang penting dalam pengendalian ekonomi makro karena memiliki dampak yang luas di berbagai sektor perekonomian. Tingginya tingkat inflasi dapat merugikan perekonomian karena dengan adanya inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya tingkat konsumsi. Akibat dari menurunnya tingkat konsumsi dapat berdampak pada melambatnya perkembangan produksi.

Hasil uji data menyatakan bahwa variable tingkat inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi di Pulau Jawa bukan inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan (*demand pull inflation*) melainkan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik (Sopiah, 2023). Selain itu, inflasi yang terjadi di Pulau Jawa masih tergolong rendah di mana dari tahun 2011 hingga tahun 2022 rata-rata inflasi di Pulau Jawa masih dibawah 5 persen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danianto & Marseto (2015) inflasi yang terjadi di Jawa Timur tahun 2006-2021 kurang dari 10 persen sehingga inflasi dianggap moderat dan berdampak kecil pada lapangan kerja. Hal ini karena inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur sebagian besar terjadi pada barang-barang konsumsi. Inflasi semacam ini berdampak kecil pada keputusan ketenagakerjaan yang dibuat oleh bisnis, rumah tangga, dan pemberi kerja lainnya, para ekonom menganggapnya tidak penting.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas (mengakibatkan kenaikan) terhadap barang lainnya. Hal tersebut berarti

tidak ada kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan teori A.W Phillips yang mengatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja dalam hal ini ialah pengangguran. Dalam kurva Phillips disebutkan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi angka pengangguran yang tidak lain adalah terjadinya penyerapan tenaga kerja (Manurung, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofrita & Marwan (2022) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dengan probabilitas sebesar 0.0000 dan koefisien regresinya 0.006118. Artinya apabila terjadi peningkatan produk domestik regional bruto maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Artinya kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan cenderung diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0061 persen.

Nilai PDRB yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah nilai tambah output atau barang yang dihasilkan dalam seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah mengalami peningkatan. Semakin besar output atau barang yang diproduksi oleh perusahaan dapat terjual maka ini akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan. Sehingga pengusaha akan melakukan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap tenaga kerja.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono (1988) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga ikut naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja). Sesuai teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan *derived demand* dari permintaan barang dan jasa, yang artinya permintaan akan tenaga kerja baru terjadi apabila adanya permintaan barang dan jasa.

KESIMPULAN

Variabel upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variable inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan variable produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2011-2022.

Hasil output regresi menunjukkan nilai F-statistik sebesar 1348,134 dan angka signifikansi sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variable independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2011-2022.

Nilai koefisien determinasi atau Adjusted R-Squared sebesar 0,99345. Hal ini berarti variable upah minimum, inflasi, dan pdrb secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa sebesar 99,34 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,66 persen dijelaskan oleh variable lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji variable upah minimum provinsi, inflasi, produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah tahun pengamatan agar dapat menghasilkan hasil yang

lebih stagnan. Selain itu, dapat menambahkan variable lainnya yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja untuk dapat memperkaya hasil penelitian di periode selanjutnya. Pemerintah juga perlu mengambil kebijakan yang tepat di mana dapat mengurangi permasalahan mengenai pengangguran, dengan cara melakukan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, S. R., & Prakoso, J. A. (2021). Analisis Faktor Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020. *Klassen, 1*(2), 135–148.
- Basnett, Y., & Sen, R. (2013). What do empirical studies say about economic growth and job creation in developing countries. *Overseas Development Institute, September*, 38.
- Bellante, D., & Jackson, M. (1985). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Boediono. (1988). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Keempat). BPFY-Yogyakarta. <https://www.hestanto.web.id/teori-pertumbuhan-ekonomi/>
- Buchari, I. (2016). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, 11*(1), 73–85. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.33>
- Danianto, G. M., & Marseto. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur. *E-Jurnal EP Unud, 4*(8), 923–950. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i1.886>
- Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja. *Inovasi, 14*(1), 36–43.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Kencana.
- Jagaditha, G. K., & Yasa, I. G. W. M. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3*(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Kristianus, A. (2023). BPS: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. *Investor.Id*. <https://investor.id/business/320973/bps-pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-terkonsentrasi-di-jawa-dan-sumatra>
- Manurung, D. S. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Agroland Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 27*(3), 230–238. https://www.researchgate.net/publication/348365795_Faktor_-_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Penyerapan_Tenaga_Kerja_Pada_Sektor_Pertanian_Di_Provinsi_Sulawesi_Tengah
- Nanga, M. (2005). Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan. In *Jakarta: Rajawali Pers*. Raja Grafindo Persada.
- Nofrita, C., & Marwan. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Slingka Nagari, 01*(2), 179–187.
- Prathama, R., & Mandala, M. (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Salemba Empat.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soelistyo, N. A. P. dan A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap

- Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 357–371.
- Sopiah, A. (2023). Hantu Inflasi Merajalela di Jawa, Ini Sebabnya! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230201155530-4-410137/hantu-inflasi-merajalela-di-jawa-ini-sebabnya>
- Tulumang, A. M., Kawung, G. M. ., & Layuck, I. A. . (2019). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pariwisata Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 24–35.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Rochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(4), 747–761. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i4.11389>
- Wasilaputri, F. R. (2016). PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PDRB DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014 | Wasilaputri | Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(3), 243–250. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ekonomi/article/view/4086>
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, S. I. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1635>